



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG  
GAJI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa Gaji Honorer/Pegawai Tidak Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 98 Tahun 2014 namun berdasarkan perkembangan Upah Minimum yang berlaku saat ini, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu ditinjau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gaji Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjinan Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : GAJI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota Tangerang yang berlokasi di Kota Tangerang.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Jenis-jenis Tenaga Kesehatan adalah medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis.
7. Tenaga Medis adalah Dokter Umum dan Dokter Gigi
8. Tenaga Keperawatan adalah Perawat dan Bidan.
9. Tenaga Kefarmasian adalah Apoteker, Analis Farmasi, dan Asisten Apoteker.

10. Tenaga kesehatan masyarakat adalah epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.
11. Tenaga gizi adalah nutrisisionis dan dietisien.
12. Tenaga keterampilan fisik adalah fisioterapis, okupasiterapis dan terapi wicara.
13. Tenaga keteknisan medis adalah radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi tranfusi dan perekam medis.
14. Tenaga non kesehatan lainnya adalah tenaga penunjang kelancaran RSUD.
15. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai bukan ASN yang bekerja pada RSUD.
16. Gaji Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Gaji Pegawai Non ASN adalah upah yang harus dibayarkan kepada Pegawai Non ASN berupa gaji yang berhak diterima oleh penerima berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## BAB II

### GAJI

#### Pasal 2

Kepada Pegawai Non ASN yang diangkat dalam suatu profesi/jabatan menurut Peraturan Wali Kota ini, diberikan gaji berdasarkan tingkat pendidikan dan profil risiko jabatan terkait sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 3

- (1) Pembayaran gaji Pegawai Non ASN dilaksanakan setiap bulan dalam satu tahun anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran gaji yang diterima oleh Pegawai Non ASN setiap bulan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD.
- (3) Pemberian gaji kepada Tenaga Part Time (Paruh Waktu) dihitung secara proporsional sejumlah hari kerja.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 4

- (1) Di samping menerima gaji, Pegawai Non ASN berhak :
  - a. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja pertahun atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
  - b. pegawai perempuan memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan;
  - c. pegawai perempuan yang mengalami gugur kandungan memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan;
  - d. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

- e. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Pegawai Non ASN yang diterbitkan oleh Direktur RSUD.
- (2) Pegawai Non ASN mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah;
  - b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
  - c. menyimpan rahasia kedokteran;
  - d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
  - e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. melaksanakan tugas profesi sebagai Pegawai Non ASN sesuai dengan program pemerintah Daerah dibidang kesehatan;
  - g. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. mengikuti pra-tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai Pegawai Non ASN pada unit kerjanya;
  - i. membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada Wali Kota Tangerang yang diketahui oleh Direktur RSUD yang sekurang-kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan dan permasalahan.

#### BAB IV

#### PEMBERHENTIAN

#### Pasal 5

- (1) Masa penugasan Pegawai Non ASN berakhir apabila :
- a. selesai melaksanakan tugas;
  - b. diberhentikan atau pemutusan secara sepihak;

- c. tewas; atau
  - d. wafat;
- (2) Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila Pegawai Non ASN melakukan pelanggaran disiplin dalam melaksanakan tugasnya atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas profesinya;
- (3) Dalam melaksanakan pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus melalui keputusan Direktur RSUD dengan tahapan :
- a. teguran lisan ;
  - b. teguran tertulis ;dan
  - c. pemberhentian gaji dan tunjangan lainnya.
- (4) Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana yang di maksud pada ayat (3) oleh dan melalui keputusan Direktur RSUD yang di lakukan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan untuk penempatan dan pengangkatan Pegawai Non ASN dilakukan oleh Direktur RSUD dengan melibatkan Perhimpunan atau kolegium profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Pegawai Non ASN ditujukan untuk :



- a. meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan di daerah; dan
  - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pegawai Non ASN kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penyuluhan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
  - b. pertemuan ilmiah/ seminar;
  - c. pendidikan dan pelatihan keterampilan yang menunjang pelaksanaan program;
  - d. pemberian penghargaan;
  - e. supervisi; dan
  - f. monitoring dan evaluasi.
- (3) Hal teknis yang tidak tertuang dalam isi peraturan Wali Kota ini akan tertuang dalam keputusan Direktur RSUD.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2014 tentang Gaji Honorer/Pegawai Tidak Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku terhitung tanggal 1 Oktober 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada Tanggal 29 Desember 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Di Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Di Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 102

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR : 102 TAHUN 2020**  
**TENTANG GAJI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KOTA TANGERANG NON APARATUR SIPIL NEGARA**

No	Jabatan	Pengalaman Kerja Dalam Tahun					
		0 - 2	> 2 - 4	> 4 - 6	> 6 - 8	> 8 - 10	> 10
1	Dokter Umum (S1)	8,970,000	9,230,000	9,490,000	9,750,000	10,010,000	10,270,000
2	Dokter Gigi (S1)	8,970,000	9,230,000	9,490,000	9,750,000	10,010,000	10,270,000
3	Perawat Spesialis (S2)	8,970,000	9,230,000	9,490,000	9,750,000	10,010,000	10,270,000
4	Psikologi klinis	7,540,000	7,800,000	8,060,000	8,320,000	8,580,000	8,840,000
5	Apoteker	7,540,000	7,800,000	8,060,000	8,320,000	8,580,000	8,840,000
6	Perawat Ners (S1)	5,850,000	6,110,000	6,370,000	6,630,000	6,890,000	7,150,000
7	Penata Anestesi (S1)	5,642,000	5,902,000	6,162,000	6,422,000	6,682,000	6,942,000
8	Petugas Proteksi Radiasi (S1)	5,850,000	6,110,000	6,370,000	6,630,000	6,890,000	7,150,000
9	Fisikawan Medis (S1)	5,642,000	5,902,000	6,162,000	6,422,000	6,682,000	6,942,000
10	Radiografer (S1)	5,642,000	5,902,000	6,162,000	6,422,000	6,682,000	6,942,000
11	Fisioterapis S1)	5,642,000	5,902,000	6,162,000	6,422,000	6,682,000	6,942,000
12	Ahli Gizi (S1)	5,642,000	5,902,000	6,162,000	6,422,000	6,682,000	6,942,000
13	Sanitarian (S1)	5,642,000	5,902,000	6,162,000	6,422,000	6,682,000	6,942,000
14	Perekam Medik (S1)	5,642,000	5,902,000	6,162,000	6,422,000	6,682,000	6,942,000
15	Asisten Apoteker (D3)	5,200,000	5,460,000	5,720,000	5,980,000	6,240,000	6,500,000
16	Perawat (D3)	4,420,000	4,680,000	4,940,000	5,200,000	5,460,000	5,720,000
17	Bidan (D3)	4,550,000	4,810,000	5,070,000	5,330,000	5,590,000	5,850,000
18	Perawat Gigi (D3)	4,420,000	4,680,000	4,940,000	5,200,000	5,460,000	5,720,000
19	Asisten Ahli Gizi (D3)	4,420,000	4,680,000	4,940,000	5,200,000	5,460,000	5,720,000
20	Analisis Laboratorium Kes (D3)	4,420,000	4,680,000	4,940,000	5,200,000	5,460,000	5,720,000
21	Tenaga Elektromedik (D3)	4,420,000	4,680,000	4,940,000	5,200,000	5,460,000	5,720,000
22	Sanitarian (D3)	4,420,000	4,680,000	4,940,000	5,200,000	5,460,000	5,720,000
23	Perekam Medik (D3)	4,420,000	4,680,000	4,940,000	5,200,000	5,460,000	5,720,000
24	Terapis Wicara (D3)	4,420,000	4,680,000	4,940,000	5,200,000	5,460,000	5,720,000
25	Okupasi Terapis (D3)	4,420,000	4,680,000	4,940,000	5,200,000	5,460,000	5,720,000
26	Prosthetist (D3)	4,420,000	4,680,000	4,940,000	5,200,000	5,460,000	5,720,000
27	Tenaga IT (S1)	5,590,000	5,850,000	6,110,000	6,370,000	6,630,000	6,890,000
28	Tenaga Programmer (S1)	7,540,000	7,800,000	8,060,000	8,320,000	8,580,000	8,840,000
28	Tenaga Hukum (S1)	5,590,000	5,850,000	6,110,000	6,370,000	6,630,000	6,890,000
29	Tenaga Akuntansi (S1)	5,590,000	5,850,000	6,110,000	6,370,000	6,630,000	6,890,000
30	Teknik Sipil (S1)	5,590,000	5,850,000	6,110,000	6,370,000	6,630,000	6,890,000
31	Mekanik Listrik / Mesin (S1)	5,590,000	5,850,000	6,110,000	6,370,000	6,630,000	6,890,000
32	Teknik Komputer (S1)	5,590,000	5,850,000	6,110,000	6,370,000	6,630,000	6,890,000
33	Tenaga Humas (S1)	5,590,000	5,850,000	6,110,000	6,370,000	6,630,000	6,890,000
34	Administrasi (S1)	5,590,000	5,850,000	6,110,000	6,370,000	6,630,000	6,890,000
35	Tenaga Admin Keuangan (D3)	4,290,000	4,550,000	4,810,000	5,070,000	5,330,000	5,590,000
36	Teknik (D3)	4,290,000	4,550,000	4,810,000	5,070,000	5,330,000	5,590,000
37	Tenaga Administrasi (D3)	4,290,000	4,550,000	4,810,000	5,070,000	5,330,000	5,590,000
38	Asisten Perawat (SMK Kes)	4,030,000	4,290,000	4,550,000	4,810,000	5,070,000	5,330,000
39	Asisten Perawat Gigi (SPRG)	4,030,000	4,290,000	4,550,000	4,810,000	5,070,000	5,330,000
40	Mekanik Listrik / Mesin (SLTA)	4,030,000	4,290,000	4,550,000	4,810,000	5,070,000	5,330,000
41	Tenaga Administrasi (SLTA)	4,030,000	4,290,000	4,550,000	4,810,000	5,070,000	5,330,000
42	Juru Masak (SLTA)	4,030,000	4,290,000	4,550,000	4,810,000	5,070,000	5,330,000
43	Pramusaji (SLTA)	4,030,000	4,290,000	4,550,000	4,810,000	5,070,000	5,330,000
44	Petugas Laundry (SLTA)	4,030,000	4,290,000	4,550,000	4,810,000	5,070,000	5,330,000
45	CSSD (SLTA)	4,030,000	4,290,000	4,550,000	4,810,000	5,070,000	5,330,000
46	Sopir (SLTA)	4,030,000	4,290,000	4,550,000	4,810,000	5,070,000	5,330,000
47	Pemulasaran Jenazah (SLTA)	4,030,000	4,290,000	4,550,000	4,810,000	5,070,000	5,330,000
48	Pengawas Keamanan (SLTA)	4,030,000	4,290,000	4,550,000	4,810,000	5,070,000	5,330,000
49	Pengawas Kebersihan (SLTA)	4,030,000	4,290,000	4,550,000	4,810,000	5,070,000	5,330,000

**WALIKOTA TANGERANG,**

**ARIEF R. WISMANSYAH**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR : 102 TAHUN 2020**  
**TENTANG GAJI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KOTA TANGERANG NON APARATUR SIPIL NEGARA**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Gaji</b>
1	Dokter Sub Sp. Bedah (konsultan)	43,532,280
2	Dokter Sub Sp. Obstetri Ginekologi (konsultan)	43,532,280
3	Dokter Sub Sp. Jantung ( Konsultan )	43,532,280
4	Dokter Sub Sp. Konsultan Intensive dan Intervensi	43,532,280
5	Dokter Sub Sp. Penyakit Dalam (konsultan)	41,527,000
6	Dokter Sub Sp. Anak (konsultan)	41,527,000
7	Dokter Sp. Obstetri Ginekologi	40,204,750
8	Dokter Sp. Bedah	40,204,750
9	Dokter Sp. Bedah Orthopedi	40,204,750
10	Dokter Sp. Bedah Urologi	40,204,750
11	Dokter Sp. Bedah TKV	40,204,750
12	Dokter Sp. Bedah Plastik	40,204,750
13	Dokter Sp. Bedah Saraf	40,204,750
14	Dokter Sp. Bedah Anak	40,204,750
15	Dokter Sp. Anestesi	35,798,750
16	Dokter Sub. Sp. Saraf ( Konsultan )	35,798,750
17	Dokter Sp. Penyakit Dalam	32,495,000
18	Dokter Sp. Anak	32,494,250
19	Dokter Sp. Jantung	32,494,250
20	Dokter Sp. Mata	29,189,750
21	Dokter Sp. THT	29,189,750
22	Dokter Sp. Paru	29,189,750
23	Dokter Sp. Saraf	29,189,750
24	Dokter Sp. Bedah Mulut	29,189,750
25	Dokter Sp. Radiologi	26,986,750
26	Dokter Sp. Kulit dan Kelamin	26,986,750
27	Psikiater/Dokter Sp. KJ	26,986,750
28	Dokter Sp. Patologi Klinik	24,783,750
29	Dokter Sp. Rehabilitasi Medik	24,783,750
30	Dokter Sp. Forensik	24,783,750
31	Dokter Sp. Patologi Anatomi	24,783,750
32	Dokter Sp. Gizi	24,783,750
33	Dokter Gigi Spesialis	19,276,250

**WALIKOTA TANGERANG,**

**ARIEF R. WISMANSYAH**